

Perubahan Kebijakan Turki: Open Door Policy Menjadi Border Wall Project Tahun 2015-2022

**Wilda Daffania Abidin
Prihandono Wibowo**

*Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur*

*email: wildadafn@gmail.com,
prihandono_wibowo.hi@upnjatim.ac.id*

ABSTRACT

This research aims to analyze changes in Turkish foreign policy regarding the Open Door Policy and identify the factors that caused the change from the Open Door Policy to the Border Wall Project. To achieve this research objective, this research focuses on the change in the direction of Turkey's foreign policy from the Open Door Policy to the Border Wall Project towards Syrian and Afghan immigrants since the conflict caused by the Arab Spring in Syria until the takeover of power by the Taliban in Afghanistan. This research uses an explanatory qualitative approach method through literature study by analyzing data based on Joakim Eidenfalk's theory of foreign policy change. The main question of this research is why did Turkey implement changes to the Open Door Policy to become the Border Wall Project in 2015-2022? The research focuses on analyzing the factors that drive changes in Türkiye's Open Door Policy. In this research, it appears that the change from the Open Door Policy to the Border Wall Project on the southern and eastern borders was due to the intensity of terrorist attacks in Turkey, changes in the direction of public opinion towards immigrants, the influence of the media on public opinion, the increase in illegal smuggling, securing Turkey's national security and increasing activities of militants and terrorist organizations near the border.

Keywords: Open Door Policy, Border Wall Project, Türkiye

Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Turki terkait Open Door Policy dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan dari kebijakan Open Door Policy menjadi Border Wall Project. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada berubahnya arah kebijakan luar negeri Turki dari kebijakan Open Door Policy menjadi Border Wall Project terhadap para imigran Suriah dan Afghanistan sejak konflik akibat Arab Spring di Suriah hingga pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban di Afghanistan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif eksplanatif melalui studi pustaka dengan menganalisis data berdasarkan teori perubahan kebijakan luar negeri oleh Joakim Eidenfalk. Pertanyaan utama penelitian ini adalah mengapa Turki menerapkan perubahan terhadap kebijakan Open Door Policy menjadi Border Wall Project pada tahun 2015-2022?. Penelitian berfokus pada analisis faktor-faktor yang mendorong perubahan kebijakan Open Door Policy Turki. Dalam penelitian ini, terlihat bahwa perubahan Open Door Policy menjadi Border Wall Project di perbatasan selatan dan timur adalah karena intensitas serangan terorisme di Turki, perubahan arah opini publik terhadap imigran, pengaruh media terhadap opini publik, meningkatnya penyelundupan ilegal, pengamanan keamanan nasional Turki dan peningkatan aktivitas militan dan organisasi teroris di dekat perbatasan.

Kata Kunci: Open Door Policy, Border Wall Project, Turki

Pendahuluan

Pasca konflik Arab Spring di Suriah pada 2011, Turki menerapkan Open Door Policy atas dasar kemanusiaan terhadap pencari suaka dengan mengizinkan mereka untuk melintasi perbatasan. Lonjakan jumlah pencari suaka yang berlindung di Turki pada 2012 mulai menimbulkan kekhawatiran bagi Turki. Pada bulan Agustus tahun 2012, pemerintah Turki telah mengumumkan bahwa batasan 100 ribu pengungsi akan menjadi garis merah (BBC Türkçe, 2012). Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketika jumlah tersebut telah tercapai, maka pembatasan jumlah akan mulai diberlakukan (Batalla & Tolay, 2018). Namun seiring dengan masifnya pergerakan migrasi pencari suaka, mulai tahun 2011 serangan terorisme di Turki meningkat. Sebagai respon Turki terhadap ancaman keamanan nasionalnya, mulai tahun 2016 Turki mulai memperketat perbatasan dengan mewajibkan perlintasan perbatasan bersyarat serta menerapkan Border Wall Project di sepanjang perbatasan dengan Suriah (Olejárová, 2018). Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan tembok perbatasan Turki dengan Iran dan Irak pada 2017 (Olejárová, 2018). Tembok perbatasan yang dibuat ditujukan untuk mengendalikan aktivitas dan pergerakan di sekitarnya.

Konflik-konflik yang ada di negara-negara Timur Tengah tidak hanya berdampak secara internal terhadap negara tersebut namun juga berdampak pada kestabilan regional dengan salah satu dampak yakni meningkatnya jumlah pencari suaka (Sayın, 2016). Membludaknya jumlah pengungsi di Turki juga diiringi dengan meningkatnya gelombang oposisi di Turki (Foschini, 2022). Turki yang menampung sebanyak 3,6 juta pengungsi Suriah yang terdaftar dan sekitar 400 ribu pengungsi dari negara lain, termasuk Afghanistan, Irak, dan Iran (Leghtas, 2019). Pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban pada 2021 menyebabkan gelombang migrasi baru ke Turki. Wilayah perlintasan yang sering dilalui para imigran Afghanistan adalah provinsi Iğdır, Ağrı, Van dan Hakkari. Di beberapa perbatasan di provinsi tersebut merupakan tempat yang seringkali digunakan untuk tempat pertemuan antara migran dan penyelundup yang biasanya menyelundupkan migran bahkan obat-obatan terlarang yang akan mengantarkan mereka masuk ke Turki (Pitonak, 2018).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis menemukan satu pertanyaan utama penelitian yakni mengapa Turki merubah kebijakan luar negeri dari kebijakan Open Door Policy menjadi Border Wall Project? Dengan demikian penelitian ini berfokus pada faktor-faktor pendorong perubahan kebijakan luar negeri Turki dalam penerapan Border Door Project. Penelitian ini mengkaji jawaban dari pertanyaan utama penelitian dengan berdasar pada teori perubahan kebijakan luar negeri oleh Joakim Eidenfalk yang terbagi menjadi dua dimensi topik. Topik pertama dianalisis melalui faktor domestik yang terdiri dari partai politik, opini publik dan media. Topik kedua akan dianalisis melalui faktor internasional yang terdiri aktor non-negara berupa organisasi teroris dan kejahatan terorganisir.

Metodologi

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bercirikan pengumpulan data yang berbentuk bukan angka. Penelitian kualitatif eksplanatif ditujukan untuk menjawab

pertanyaan utama penelitian ini yakni “mengapa?”. Melalui penelitian eksplanatif, dapat dianalisis bagaimana korelasi antara dua atau lebih variabel baik pola, arah, sifat, bentuk, maupun kekuatan hubungannya (Silalahi, 2009). Penelitian kualitatif eksplanatif digunakan dengan tujuan menjelaskan sebab terjadinya peristiwa (Silalahi, 2009). Tipe penjelasan Casual Explanations digunakan dalam penelitian ini dengan berfokus penjelasan yang menjelaskan sebab akibat. Dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dan dikumpulkan dari buku, artikel jurnal dan situs internet. Analisis data dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena pengumpulan data yang bersifat kata dan bukan angka.

Landasan Teori

Perubahan Kebijakan Luar Negeri

Politik luar negeri adalah suatu kegiatan yang berbentuk pertahanan dan perlindungan kepentingan negara. Dalam teori foreign policy change atau perubahan kebijakan luar negeri oleh Joakim Eidenfalk dijabarkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh faktor domestik dan internasional. Menurut Joakim Eidenfalk (2009), faktor domestik berperan dalam mendorong pemerintah supaya melakukan perubahan kebijakan luar negeri. Dalam faktor domestik, pihak yang berinteraksi terhadap kebijakan berupa dukungan dan/atau kritik dari partai politik, dalam hal ini partai politik oposisi yang cukup sering menyuarakan isu tertentu dapat memberikan dorongan terhadap pemerintah untuk mengubah kebijakan. Selain itu, kritik dan tekanan yang ada diantara masyarakat dapat memberikan tekanan pada parlemen untuk merubah kebijakan. Dalam hal ini opini publik menjadi salah satu faktor penting karena pemerintah memerlukan dukungan dari rakyat untuk berjalannya kebijakan. Media dapat berperan dalam pembentuk opini publik dan penyambung informasi antara pemerintah dan masyarakat, hal tersebut menjadikan media dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan dapat berperan sangat signifikan terhadap perubahan kebijakan. Selain itu, birokrasi dan kelompok kepentingan juga merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap pembuat keputusan.

Dalam perubahan kebijakan luar negeri, pembuat kebijakan suatu negara tidak dapat menghiraukan faktor internasional yang ada. Faktor internasional yang perlu dipertimbangkan dalam perubahan kebijakan luar negeri suatu negara terdiri dari faktor global, faktor regional, hubungan bilateral, dan aktor non negara. Salah satu aktor non-negara yang termasuk dalam faktor internasional adalah aktor transnasional. Aktor transnasional yang dimaksud dalam kategori ini adalah aktor transnasional berupa jaringan teroris, jaringan kriminal, korporasi, organisasi hak asasi manusia, dan lain-lain. Aktor transnasional berperan sangat penting dalam perubahan kebijakan luar negeri karena aktor-aktor non-negara seringkali dapat memberikan pengaruh terhadap isu-isu tertentu. Teori kebijakan luar negeri oleh Joakim Eidenfalk menunjukkan kompleksitas dalam perubahan kebijakan luar negeri serta menggambarkan bahwa perubahan kebijakan seringkali dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai aktor dan dinamis. Hal tersebut memberikan

gambaran bahwa kebijakan luar negeri terus berkembang seiring waktu sebagai respon pemerintah terhadap faktor domestik dan internasional. Aktor-aktor utama seperti pemimpin politik dan pembuat kebijakan juga memerankan peranan penting dalam terbentuknya arah perubahan kebijakan. Nilai-nilai, ideologi dan persepsi aktor utama dapat mempengaruhi arah perubahan kebijakan.

Faktor Pendorong Perubahan Kebijakan Open Door Policy

Pintu-pintu yang terbuka akibat kebijakan Open Door Policy bagi para pencari suaka sebelumnya, kini sudah mulai menjadi lebih ketat bahkan tertutup untuk migrasi massal bagi para pencari suaka (Özbey, 2022). Perbatasan muncul terutama sebagai wilayah di mana ketertiban dari dalam terancam oleh gangguan dari luar. Namun, yang lebih penting, gangguan eksternal dapat menjadi persoalan terhadap kondisi ketertiban internal (Duez, 2014). Pada bagian ini penjabaran kemungkinan alasan yang menyebabkan perubahan kebijakan Open Door Policy Turki menjadi Border Wall Project dengan mengelompokkannya menjadi 2 kategori yakni faktor domestik dan faktor internasional.

Faktor Domestik

Faktor domestik tidak dapat dipisahkan dari kondisi politik dalam negeri. Timbulnya pro kontra antar partai politik dalam negeri Turki memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Partai politik memiliki pandangan masing-masing sesuai ideologi masing-masing ketika memandang kebijakan Open Door Policy Turki. Mayoritas partai politik oposisi yang mengkritik pemerintah terhadap penerapan kebijakan Open Door Policy oleh AKP dan menyoroti masalah utama dan anti-imigrasi merupakan partai yang memiliki perbedaan ideologi dengan partai AKP. Partai oposisi seringkali menyoroti permasalahan yang ditimbulkan akibat membludaknya jumlah pencari suaka yang berlindung di Turki. Permasalahan yang disorot antara lain perubahan demografi Turki, keamanan nasional dan perekonomian nasional. Dengan banyaknya pencari suaka yang berlindung di Turki dalam waktu yang relatif singkat menimbulkan peningkatan sentimen anti migran dan perdebatan sosial di antara masyarakat yang berpengaruh pada angka perolehan suara masing-masing partai pada pemilihan umum (Balta et al., 2022). Berdasarkan data dari BBC, pada pemilihan umum parlemen Turki ke-28, meski partai AKP unggul, namun perolehan suara yang didapat turun sebanyak 35,6% (Kaska, 2023).

Pernyataan-pernyataan yang pernah dilontarkan dan program-program oleh partai CHP, partai IYI dan partai ZP cukup menggambarkan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan Open Door Policy. Wacana kebijakan yang diadopsi partai CHP menekankan pada sektor keamanan, ekonomi dan budaya. CHP berpandangan kebijakan keimigrasian yang tidak tepat yang diterapkan oleh AKP dengan terlalu ikut andil dalam permasalahan Timur Tengah telah membuat Turki mengalami kerugian besar dan mengancam sosio budaya Turki (Cumhuriyet Halk Partisi, 2019). Partai CHP juga menyorot penurunan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat Turki yang menurun (Cumhuriyet Halk Partisi, 2019). Dari segi budaya, CHP menekankan pada akibat dari migrasi yang tidak terkendali yang dapat mengancam struktur demografi Turki (Saylan & Aknur, 2023). Dalam hal ini, ungkapan dari

walikota Hatay, Lütfü Savaş pada tahun 2022 berpenduduk 1,6 juta jiwa, sekitar 450-550 ribu pencari suaka Suriah dan sekitar 100-300 ribu merupakan imigran tidak terdaftar serta angka kelahiran pencari suaka Suriah yang cukup tinggi (Yücel, 2022). Hal tersebut menggambarkan salah satu alasan meningkatnya tingkat kekhawatiran warga negara terhadap struktur demografi Turki yang juga disorot oleh partai-partai oposisi, salah satunya partai CHP.

Selain itu, CHP juga menekankan pada sektor keamanan terhadap imigrasi ilegal secara besar-besaran oleh para imigran Afghanistan, sebagai tanggapan terhadap tingginya jumlah pengungsi, partai CHP memasang poster yang bertuliskan “Sınır Namustur” atau “perbatasan adalah kehormatan” di gedung partainya (Sozcu, 2021). Namun, wacana anti-imigran yang dianut CHP dinilai lebih halus dibandingkan dengan pandangan dari partai IYI dan partai ZP, akan tetapi wacana yang diusung CHP tentang imigrasi dipandang lebih keras daripada partai AKP dan partai HDP (Kimya, 2022). Pada 2021, melalui pernyataan lewat pidato yang disampaikan oleh pemimpin partai CHP, Kılıçdaroğlu menyatakan indikasi sentimen anti-imigran yang semakin meningkat, khususnya ketika Turki terancam gelombang migrasi baru setelah mundurnya Amerika Serikat dari Afghanistan dan jatuhnya kekuasaan Afghanistan ke tangan Taliban oleh para pencari suaka Afghanistan. Kılıçdaroğlu mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 2 tahun setelah berkuasa, pihaknya akan merelokasi para pengungsi untuk kembali ke negara mereka masing-masing sembari melindungi nyawa, kesehatan dan harta mereka (Euronews, 2021). Partai CHP menyeimbangkan antara sektor keamanan, ekonomi dan sosial budaya dengan menitikberatkan pada relokasi atau bahkan pemulangan untuk para pengungsi. Pada awalnya CHP mengakui hak kemanusiaan yang berhak didapat oleh para pengungsi, namun disisi lain partai CHP juga tidak menganggap ringan dari dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kebijakan Open Door Policy yang seiring waktu telah meningkatkan kekhawatiran mengenai menurunnya kesejahteraan masyarakat Turki.

Selain CHP, partai oposisi yang juga mengkritik kebijakan imigrasi dan Open Door Policy adalah partai IYI. Partai IYI yang didirikan pada 2017 oleh Meral Akşener mencerminkan dirinya sebagai partai yang selaras dengan nilai-nilai Kemalisme. Dalam hal ini, partai IYI berafiliasi dengan partai CHP dan telah menjadi salah satu oposisi terhadap partai AKP dan partai MHP. Partai IYI dan pemilihnya mayoritas memiliki pandangan negatif terhadap kebijakan Open Door Policy dan para pengungsi (Kimya, 2022). Partai IYI dalam laporannya yang berjudul *Strateji Belgesi ve Eylem Planı Milli Goc Doktrini* mengkritik kebijakan Open Door Policy oleh pemerintah pusat yang diterapkan tanpa perencanaan dan kebijakan yang matang untuk kedepannya (GYG Parti, 2022). Dalam hal ini, partai IYI mengkritik pemerintahan dengan menyoroti terkait tidak diterapkannya perencanaan pemukiman dan sistem kuota yang menyebabkan para pencari suaka menyebar ke seluruh bagian negara Turki. Ketua partai IYI, Meral Akşener menyoroti dana yang dikeluarkan oleh Turki yang berjumlah 65 Miliar dollar untuk imigrasi selama masa pandemi yang seharusnya dapat bermanfaat bagi perekonomian negara Turki bila ada kebijakan migrasi yang teratur dan terencana (Cumhuriyet.tr, 2021). Di sektor budaya, Meral Akşener menyoroti perubahan demografi Turki di provinsi-provinsi dekat perbatasan yang mayoritas berada di provinsi

Kilis, Hatay, g nlurfa dan Gaziantep (Y cel, 2022). Pada 2021, Aytun Cıray mengungkapkan bahwa imigrasi yang tidak terkendali dari Suriah, Afghanistan dan negara- negara lainnya telah menjadi masalah keamanan sosial karena jumlah populasi serta anggota-anggota organisasi terorisme dapat leluasa masuk bersamaan dengan para pencari suaka (Saylan & Aknur, 2023). Dalam hal ini, partai IYI berfokus pada pengamanan perbatasan dengan berprinsip bahwa perbatasan merupakan kehormatan.

Sejalan dengan fokus utama partai IYI yaitu prinsip keamanan perbatasan, partai IYI mengungkapkan doktrin pertama dalam doktrin imigrasi nasional Partai IYI bahwa pihaknya akan menjamin pengawasan penuh perbatasan dengan memperkuat tembok perbatasan dengan Suriah, Iran dan Irak dan mencegah penyebrangan ilegal (GYG Parti, 2022). Pada doktrin kedua dari doktrin tersebut menyebutkan partai IYI berjanji untuk mengusahakan cara yang terbaik dengan damai untuk memulangkan para pencari suaka ke negaranya masing-masing. Selain itu, pada doktrin ketiga partai IYI menitikberatkan pada tindakan pencegahan gelombang imigrasi baru yang mencakup pengambilan tindakan melalui kerjasama antar negara untuk mengurangi migrasi masal di negara asal para pengungsi. Pada doktrin keempat, partai IYI menitikberatkan pada kesepakatan dan perjanjian di arena internasional secara terbuka dan transparan. Selain itu, perjanjian penerimaan migran dengan Uni Eropa akan ditinjau ulang dan bila perlu, akan dibatalkan karena partai IYI berprinsip bahwa Turki tidak akan pernah menjadi negara parit bagi negara atau kelompok negara manapun (GYG Parti, 2022). Pada tahun 2022, salah satu anggota partai IYI sekaligus seorang Deputi Kocaeli mengajukan rumusan Amandemen Undang-Undang Penyelesaian kepada Presiden Majelis Agung Nasional Turki dengan menuliskan saran agar jumlah penduduk dengan status dibawah perlindungan sementara yang tinggal d provinsi, kabupaten, kota kecil, desa dan sekitar pemukiman tidak boleh melebihi 10% jumlah penduduk yang bermukim di lingkungan tersebut. Selain itu, para pencari suaka tidak diperbolehkan membangun lingkungan tersendiri, khususnya di wilayah Kilis, Hatay, Gaziantep, g nlurfa, Mersin Adana dan Mardin yang dapat mengancam stuktur demografi dan keamanan nasional hingga menyebabkan kerusuhan sosial (Ekonomim, 2022). Dalam pengajuan rumusan tersebut mencerminkan bahwa program yang diusung partai IYI dimaksudkan untuk mencegah perubahan sosial budaya Turki (GYG Parti, n.d.).

Selain partai CHP dan partai IYI, partai ZP juga merupakan salah satu partai yang kontra terhadap membludaknya jumlah imigran di Turki. Partai ZP menekankan loyalitasnya terhadap prinsip-prinsip Kemalis dengan berslogan “Turki milik Turki” (Zafer Partisi, 2022). Partai ZP atau Zafer Parti merupakan partai yang didirikan pada 2021 dengan fokus utamanya pada keimigrasian serta menjadi partai sayap kanan ultranasionalis anti-imigran versi Turki (Balta et al., 2022). Pada 2021, Ketua partai ZP Umit  zdağ bersama beberapa anggotanya mengunjungi daerah di dekat perbatasan Turki-Iran dengan menampilkan spanduk dengan kalimat “Perbatasan adalah kehormatan” (Veryasin TV, 2021). Selain itu, dalam Zafer Partisi KuruluĐ Manifestosu (2021), partai ZP mengusulkan dikembalikannya para pengungsi ke negara masing-masing dan Anadolu Kalesi atau Benteng Anatolia akan dibangun untuk melindungi perbatasan dan mencegah besarnya jumlah pengungsi di masadepan (Zafer Partisi, 2021). Selain ancaman perbatasan, ancaman narkoba tidak luput dari pandangan partai ZP. Dalam manifestasi tersebut, Partai ZP menyatakan bahwa mereka

akan memperjuangkan perlawanan dalam melawan mafia narkoba dari Afghanistan, Suriah dan PKK serta meluasnya kartel tersebut baik didalam maupun diluar negara (Zafer Partisi, 2021). Selain dari sektor keamanan, dalam wawancara Bloomberg, pemimpin partai ZP Ümit Özdağ mengungkapkan bahwa dana yang digelontorkan untuk para pengungsi Timur Tengah, Asia dan Afrika yang melewati Turki untuk pergi ke Eropa, akan lebih baik jika dana tersebut dibelanjakan untuk kepentingan negara dan rakyat Turki sendiri (Hacaoglu, 2022). Selain itu, tingginya angka kelahiran para pengungsi mengindikasikan bahwa Turki cepat atau lambat akan memiliki penduduk mayoritas Arab di beberapa wilayah yang kemungkinan dapat menyebabkan kekacauan dalam kehidupan sosial dan politik (Saylan & Aknur, 2023).

Kritik-kritik yang didapat pemerintah Turki terhadap kebijakan Open Door Policy secara tidak langsung telah mempengaruhi kondisi politik domestik Turki serta meningkatkan kekhawatiran diantara masyarakat. Dengan diangkatnya topik imigrasi secara tidak langsung telah berpengaruh pada opini publik dan persepsi masyarakat Turki. Dengan diterapkannya Border Wall Project oleh Turki mencerminkan pro dan kontra yang ada dalam kehidupan domestik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan kebijakan Open Door Policy. Namun, meski terdapat beberapa perbedaan pandangan antar partai-partai domestik yang ada di Turki, semua partai besar di Turki telah berjanji untuk memulangkan pengungsi bila mereka terpilih. Selain itu, menurunnya angka suara yang didapat AKP mengindikasikan bahwa eksistensi dorongan dari pernyataan kritik dari partai oposisi memberikan pengaruh pada angka suara yang diperoleh AKP.

Pada awal terjadinya gelombang migrasi pada tahun 2011, masyarakat Turki berpandangan bahwa perang di Suriah akan terselesaikan dalam waktu dekat, nyatanya dengan semakin larutnya perang saudara di Suriah dan meningkatnya jumlah pengungsi seiring waktu menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat Turki. Kekhawatiran masyarakat tidak hanya didasari oleh ideologi yang dianut, akan tetapi berasal dari beragam warna ideologi dan mendukung pemulangan para pengungsi ke negaranya atau setidaknya merelokasi mereka di kamp pengungsian (Sancar, 2022). Hal tersebut didasari oleh terpuruknya perekonomian Turki sejak tahun 2017 dengan hiperinflasi. Selain itu, berpindahnya kekuasaan Afghanistan ke tangan Taliban pada 2021 juga turut mempengaruhi perubahan arah opini publik masyarakat Turki dan meningkatkan keyakinan bahwa para pengungsi akan menetap di Turki (Tahiroğlu, 2022). Meningkatnya anti-sentimen masyarakat terhadap para pengungsi seiring waktu berubah menjadi kekerasan. Pada tahun 2017, sebanyak 300 orang dilaporkan menyerang pengungsi di wilayah Izmir yang membuat sebanyak 500 orang pengungsi meninggalkan daerah tersebut (Diken, 2017). Pada 2021, sekelompok orang yang tidak diketahui wajahnya merusak bisnis milik para pengungsi di Altındağ, Ankara (Tahiroğlu, 2022). Sementara itu, persepsi umum mayoritas di lingkungan sekitar distrik Altındağ, Ankara adalah bahwa toko yang dimiliki warga Suriah tidak berizin legal dan tidak dikontrol, oleh sebab itu, para pengungsi dinilai meraup keuntungan yang tidak adil terhadap Turki dengan tanpa membayar pajak (Öztürk, 2021).

Dalam sebuah film pendek yang ditayangkan pada bulan Mei 2022 berjudul “Sessiz Ğstila” didasari pada latar waktu pada tahun 2011 ketika gelombang pengungsi mulai meningkat, film ini menggambarkan dalam skenarionya pada tahun 2043 dimana masyarakat Turki telah menjadi orang asing di negaranya sendiri dan juga digambarkan pada saat itu, negara Turki dipimpin oleh orang Arab (Karacasu, 2022). Dari segi sektor budaya, perbedaan yang paling signifikan antara masyarakat Turki dengan pengungsi adalah sosial budaya, utamanya dalam bahasa dan religiuitas gaya hidup. Bahasa utama negara Turki adalah bahasa Turki. Selain itu, dari segi religiuitas gaya hidup, mayoritas masyarakat Turki yang sekuler menganggap religiuitas yang seringkali secara eksplisit ditampilkan oleh para pengungsi sebagai ancaman terhadap cara hidup mereka, atau bahkan ancaman keamanan (Sar & Kuru, 2020). Pada penelitian sebelumnya oleh Yasar (2014), ditemukan bahwa di provinsi dimana banyak pengungsi Suriah terpusat, meski wilayah tersebut berdekatan secara geografis dengan Turki, akan tetapi para pengungsi menyatakan bahwa terdapat masalah budaya (Özdemir, 2018). Hal tersebut mengindikasikan adanya masalah perbedaan sosial budaya antara masyarakat Turki dan pengungsi. Dengan bebasnya para pengungsi yang menyebar ke seluruh Turki turut mengakibatkan peningkatan kekhawatiran oleh masyarakat Turki yang disertai dengan kritikan yang dilontarkan partai-partai oposisi domestik serta berita-berita tentang para pengungsi. Selain itu, melonjaknya jumlah pengungsi ilegal yang ditangkap juga turut mempengaruhi persepsi masyarakat. Banyaknya jumlah pengungsi yang tidak dikontrol dengan kebijakan pemukiman yang lebih terkontrol menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap perubahan komposisi demografi Turki. Selain itu, kebebasan yang didapat dalam melintasi perbatasan oleh kebijakan Open Door Policy dapat meningkatkan kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan nasional Turki, salah satunya terhadap ancaman teror oleh kelompok-kelompok radikal yang dapat memasuki Turki.

Dalam hal ini, media juga turut andil sebagai salah satu faktor perubahan kebijakan. Media sebagai sumber informasi dapat mempengaruhi publik. Pemberitaan yang diusung media melalui berbagai platform media maupun surat kabar memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap persepsi masyarakat Turki terhadap para pengungsi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Goker & Keskin (2015) pada tahun 2015 menemukan sebanyak 268 berita tentang pengungsi. Pendekatan dalam berita yang dilaporkan media sangatlah penting dalam mempengaruhi persepsi masyarakat. Dalam data yang tertera pada penelitian Goker & Keskin (2015) tercermin bahwa sebagian besar berita yang diterbitkan oleh 5 sampel media mengandung pendekatan negatif sebanyak 78% (Göker & Keskin, 2015). Hal tersebut tentu berdampak signifikan terhadap perspektif masyarakat Turki terhadap pengungsi (Özdemir, 2018). Selain itu, berdasarkan data yang didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Wakili & Cangöz (2022) tentang imigran Afghanistan dalam 4 surat kabar nasional Turki antara tahun 2015-2022 menemukan bahwa imigran Afghanistan seringkali ditampilkan sebagai pelaku kejahatan atau penjahat pada urutan pertama dan ditampilkan terhormat sebagai individu yang profesional dengan total jumlah lebih sedikit, yakni pada urutan ke-7 dari total 9 sebaran topik (Wakili & Cangöz, 2022). Hal tersebut mengisyaratkan bahwa mayoritas sebaran topik terhadap para imigran digambarkan sebagai ancaman dengan menyoroti topik-topik seperti kriminalitas dan migrasi ilegal. Dalam hal ini, informasi yang dimuat media dapat memicu meningkatnya persepsi negatif dari masyarakat

terhadap para pengungsi. Hal tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi perubahan kebijakan Open Door Policy dikarenakan opini publik dan media saling berkaitan.

Faktor Internasional

Arab spring yang terjadi di Suriah yang berdekatan dengan Turki tentu menimbulkan ancaman keamanan terhadap Turki. Maraknya organisasi-organisasi bersenjata yang bermukim di Suriah meningkatkan potensi ancaman perbatasan terhadap keamanan nasional Turki. Sebagai respon terhadap ancaman yang dihadapinya, Turki meluncurkan operasi guna meningkatkan stabilitas kawasan perbatasan, mencegah terbentuknya kelompok teror, dan menetralsir ancaman keamanan nasional serta menciptakan zona aman untuk pemulangan pengungsi Suriah di Suriah Utara (Ferah & Tunca, 2022). Kebijakan Open Door Policy yang pada awalnya diterapkan memudahkan perpindahan individu maupun kelompok dari suatu negara menuju Turki. Namun, kebebasan melintas tersebut tidak hanya menimbulkan membludaknya jumlah pengungsi, akan tetapi juga menyebabkan bebasnya individu atau organisasi yang berafiliasi dengan organisasi teroris yang semakin menambah ancaman terhadap keamanan nasional Turki. Kehadiran organisasi teroris seperti ISIS di dekat area perbatasan Turki semakin meningkatkan ancaman bagi Turki. Seperti ancaman yang disebabkan oleh ISIS, ancaman yang disebabkan oleh PKK telah menjadi fokus utama Turki dalam kebijakan luar negerinya (Ataman & Özdemir, 2018).



Gambar 1 Indeks Terorisme di Turki
Sumber: (Trading Economics, 2023)

Sejak terjadinya Arab spring di Suriah pada 2011, berdasarkan data pada gambar 1, terorisme di Turki telah meningkat drastis. Letak geografis Turki yang berbatasan dengan Suriah dan Irak memungkinkan Turki untuk menerima serangan dari berbagai teroris. Turki menerapkan strategi untuk menetralsir ancaman melalui operasi yang dilaksanakan di area

dekat perbatasan daripada memerangi ancaman teroris di dalam wilayah negara saja (Ferah & Tunca, 2022). Akibat turunya rezim Assad menyebabkan munculnya wilayah-wilayah yang tidak terkontrol dan menjadikan wilayah tersebut tempat yang nyaman bagi para teroris. Setelah seragam bom bunuh diri oleh ISIS di Kilis dan Suruc pada 2015, sayap bersenjata PKK yakni HPG mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan balas dendam terhadap dua petugas polisi yang dituduh berafiliasi dengan ISIS (Al Jazeera, 2015). Sejak saat itu pula Turki secara terang-terangan mengambil posisi garis keras terhadap PYD, PKK dan ISIS serta menyatakan ketiganya sebagai organisasi teroris yang mengancam keamanan Turki (Okay, 2017). Tahun 2015 ditandai sebagai awal dimana Turki perlahan mulai meningkatkan aksi militer direct cross-bordernya melawan PKK dan ISIS dan pada saat yang sama, Turki juga mempercepat proses penutupan perbatasan sepenuhnya, terutama di perbatasan dengan Suriah (Okay, 2017).

Pada tahun 2015, konflik antara Turki dan militan Kurdi mulai berkembang. Sejak tahun 2017 dan setelahnya, konflik tersebut perlahan mulai berpindah ke area tenggara dekat perbatasan Turki. Pada 2019 titik konflik berpindah ke Irak Utara dan Suriah Utara (International Crisis Group, 2023). Berdasarkan data dari penelitian yang dilakukan Ozdemir (2022), terdapat 217 serangan, 151 diantaranya dilakukan oleh YPG, 64 diantaranya dilakukan oleh PKK dan 2 diantaranya dilakukan oleh PJAK. Pada tahun 2022, PKK dan YPG masih menjadi ancaman yang berpengaruh bagi Turki baik didalam maupun diluar perbatasan meski peningkatannya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah serangan pada 2021 (Üzen, 2023). Secara geografis, serangan teroris di Turki paling banyak terjadi di provinsi Hakkari dan Diyarbakir (Ozdemir, 2022). Berdasarkan data yang tertera pada gambar 1 menunjukkan peningkatan terorisme di Turki yang dimulai pada tahun 2011 dengan jumlah tertinggi pada tahun 2016, hal tersebut tentu mendorong Turki untuk mengamankan negaranya dengan melakukan perubahan kebijakan dengan menerapkan Border Wall Project. Berdasarkan data peta peristiwa kekerasan dalam konflik Turki dan PKK, oleh International Crisis Group (2023), tercermin bahwa sebagian besar konflik terjadi di dekat area perbatasan Turki dengan Suriah dan Irak Utara. Hal tersebut secara tentu berkontribusi dalam memberikan pengaruh dan menekan Turki untuk meningkatkan keamanan negaranya dari organisasi-organisasi teroris, khususnya di dekat perbatasan dengan membangun tembok perbatasan atau Border Wall Project.

Letak wilayah Turki yang terletak di antara Timur Tengah, Asia dan Eropa menjadikan Turki menjadi wilayah yang rentan menjadi titik persimpangan dalam penyelundupan baik penyelundupan manusia maupun obat-obatan terlarang. Perdagangan transnasional tersebut merupakan salah satu resiko dari wilayah Turki yang terletak diantara negara-negara pemasok, salah satunya Afghanistan. Oleh sebab itu, Turki menjadi jalur penyelundupan obat-obatan terlarang, khususnya heroin dari Afghanistan ke Barat melalui Balkan (Cengiz, 2016). Kedekatan Turki dengan konflik di negara-negara tetangganya seperti di Suriah dan Irak juga berpengaruh dalam meningkatkan dan membentuk perdagangan narkoba di Turki (Cengiz, 2016). Perdagangan narkoba di Turki, selain bagian dari ancaman keamanan nasional, perdagangan narkoba juga menjadi sumber penghasilan dari organisasi teroris seperti PKK yang sebagian didanai lewat perdagangan narkoba (Cengiz, 2016). Budidaya ganja sebagian besar terpusat di tenggara Turki baik yang legal

maupun ilegal, dan mayoritas dikelola oleh kelompok atau individu yang terkait dengan PKK (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2022). Setelah jatuhnya kekuasaan Afghanistan ke tangan Taliban, gelombang migrasi mulai meningkat dan pencari suaka Afghanistan seringkali melintasi Pakistan dan Iran untuk bisa sampai ke perbatasan Timur Turki yang berbatasan dengan Iran, selain itu para pencari suaka Afghanistan biasanya melintasi perbatasan bersama dengan migran dari Pakistan, Iran dan negara-negara Asia lainnya ketika menuju perbatasan Turki dengan bantuan penyelundup (IFMAT, 2022). Perlintasan tersebut merupakan jalur lama yang juga digunakan penyulundupan heroin dari Afghanistan ke Eropa melalui Turki dan Balkan.

Menurut PBB pada tahun 2020, Afghanistan memproduksi sekitar 85% produksi opium global (Noorzai, 2021). Ketika masih berada dalam pemerintahan Republik, Afghanistan memiliki sektor ekonomi terbesar dalam hal perdagangan narkoba (Stone, 2022). Gelombang imigrasi pengungsi diduga dieksploitasi oleh para penyelundup untuk menyelundupkan narkoba melintasi perbatasan (Takva, 2022). Pada tahun 2020, sebanyak hampir 14 ton heroin telah disita di Turki, penyitaan heroin dan narkoba dalam jumlah besar kerap kali terjadi di Provinsi Turki yang berbatasan dengan Iran yakni Provinsi Van (IFMAT, 2022). Pada 2021, Turki berhasil menyita sebanyak 5,5 ton obat terlarang, hasil tersebut meningkat dari 4,1 ton pada tahun sebelumnya (Daily Sabah, 2022). Didasari pada hal tersebut, Turki menitikberatkan fokusnya terhadap upaya dalam mencegah penyelundupan obat terlarang dan penyelundupan manusia. Berdasarkan Laporan Narkoba Nasional Turki tahun 2022, organisasi PKK/KCK-PYD/YPG berkaitan dengan perdagangan narkoba di Turki. Pada awalnya organisasi PKK/KCK-PYD/YPG hanya mengambil komisi dari mafia narkoba sebagai imbalan karena menutup mata terhadap apa yang dilakukan para mafia narkoba dan memberi mereka perlindungan (Turkiye Republic Of Ministry Of Interior & Turkish National Police Counter Narcotics Department, 2022). Akan tetapi, dari hasil yang cukup besar dari apa yang didapat dari perdagangan tersebut membuat organisasi PKK/KCK-PYD/YPG memutuskan untuk terlibat langsung dalam perdagangan tersebut. Sejumlah operasi yang dilakukan Turki untuk mencegah peredaran narkoba dalam jumlah besar yang diamati selama operasi mengarah pada PKK/KCK-PYD/YPG (Turkiye Republic Of Ministry Of Interior & Turkish National Police Counter Narcotics Department, 2022).

Keterkaitan PKK dalam bisnis obat terlarang dimulai sekitar 1980an, dimana para penyelundup obat terlarang dari Iran diwajibkan membayar pajak kepada PKK yang menguasai kedua sisi perbatasan Turki-Iran jika hendak menuju Turki (Cengiz, 2016). Pada tahun 2013, ketika penyelundup narkoba ditangkap di Turki, penyelundup narkoba tersebut berkata mustail bila hendak melewati perbatasan tanpa membayar pada PKK dan hanya penyelundup yang terikat dengan organisasi tersebut yang dapat melintas tanpa membayar (Cengiz, 2016). Disisi lain, organisasi teroris PKK diduga tidak hanya memungut pajak dari perdagangan obat terlarang, namun mereka juga terlibat dalam logistik penyelundupan obat terlarang ke Eropa (Basra & ICSR, 2019). Jumlah penyitaan obat-obatan pada tahun 2014-2022 yang diterbitkan oleh T. C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI (2023) menunjukkan peningkatan jumlah penyitaan obat-obatan di Turki setiap tahunnya dengan jumlah tertinggi pada tahun 2021 (T. C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI, 2023). Selain itu,

berdasarkan perhitungan oleh GI TOC atau Global Initiative Against Transnational Organized Crime, ditemukan bahwa meningkatnya perdagangan kokain di Turki tergambar dari skor pasar kokainnya yang mengalami peningkatan dari sebelumnya sebanyak 4,0 menjadi 5,50 sejak 2021 (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2023). Hal-hal tersebut tentu mendorong Turki untuk lebih memfokuskan upayanya dalam mencegah penyelundupan obat terlarang dan penyelundupan manusia, salah satu upaya yang tercermin dalam hal ini adalah peningkatan keamanan perbatasan dengan diterapkannya Border Wall Project. Penjabaran yang tertera turut memperkuat bukti bahwa Kebijakan Open Door Policy yang diterapkan justru meningkatkan ancaman bagi Turki. Selain itu, dorongan yang tercipta dari berbagai pihak telah mendorong Turki untuk mengamankan keamanannya dari berbagai ancaman, salah satunya penyelundupan di area perbatasan.

Kesimpulan

Perubahan kebijakan luar negeri adalah suatu bentuk respon negara dalam dimanisnya politik luar negeri. Salah satu tujuan penting terjadinya perubahan kebijakan luar negeri adalah perlindungan terhadap keamanan negara. Berubahnya kebijakan luar negeri dilatarbelakangi oleh beberapa faktor pendorong dengan memberi tekanan pada pemerintah untuk merubah kebijakannya. Perubahan kebijakan luar negeri umumnya dipengaruhi oleh faktor domestik dan faktor internasional yang berbeda-beda. Berubahnya kebijakan Open Door Policy Turki menjadi Border Wall Project dipengaruhi oleh faktor domestik dan internasional.

Kebijakan Open Door Policy Turki pada awalnya dimaksudkan atas dasar rasa kemanusiaan, namun seiring waktu dampak dari Open Door Policy mulai memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial dan politik Turki. Konflik yang berkelanjutan dan dampak dari kebijakan Open Door Policy berupa masifnya jumlah pencari suaka yang bernaung di Turki memberikan dorongan pada Turki untuk merubah kebijakan Open Door Policy menjadi kebijakan Border Wall Project di area sekitar perbatasannya. Diterapkannya Border Wall Project dilatarbelakangi oleh alasan Turki untuk melindungi masyarakat dan keamanan nasionalnya. Jumlah dana yang telah digelontorkan pemerintah Turki untuk membantu kehidupan para imigran pencari suaka telah menimbulkan ketimpangan sosial dan perubahan persepsi pada masyarakat. Sebagai usahanya dalam menstabilkan kehidupan masyarakat domestik dan meningkatkan keamanan nasionalnya, Turki menerapkan Border Wall Project atau memperketat perbatasan dengan cara membangun tembok perbatasan mulai tahun 2016.

Dorongan yang dihasilkan oleh pernyataan-pernyataan dari partai politik oposisi domestik turut memberikan tekanan pada pemerintah Turki dalam perubahan kebijakan Open Door Policy. Dorongan yang dilontarkan partai-partai oposisi domestik yang diiringi dengan meningkatnya sentimen anti-migran di masyarakat turut berpengaruh secara signifikan dalam perubahan kebijakan. Meningkatnya sentimen anti-imigran diantara masyarakat menyebabkan berubahnya arah opini publik masyarakat Turki. Perubahan arah opini publik masyarakat Turki ditandai dengan menurunnya suara yang diperoleh oleh AKP dalam

beberapa pemilu. Selain itu, media sebagai sumber informasi dalam hal ini berperan sangat penting dalam membentuk persepsi masyarakat dengan topik-topik berita yang diangkatnya dalam surat kabar yang juga berpengaruh signifikan dalam memberikan dorongan kepada pemerintah untuk merubah kebijakan luar negerinya.

Konflik berkelanjutan yang belum sepenuhnya mereda di negara-negara tetangga Turki secara tidak langsung menimbulkan ancaman terhadap keamanan Turki. Meningkatnya terorisme di Turki sejak 2011 dengan jumlah tertinggi pada 2016 berpengaruh signifikan dalam mendorong Turki untuk merubah kebijakan Open Door Policy guna meningkatkan keamanan negara. Konflik yang terjadi antara PKK dan Turki yang sebagian besar terpusat di wilayah perbatasan yang sedang diterapkan Border Wall Project yakni perbatasan dekat Suriah dan Irak utara mengisyaratkan bahwa tujuan utama Turki adalah meningkatkan keamanan negara dan mencegah serangan terorisme. Selain terorisme, dengan meningkatnya penyitaan obat-obatan terlarang di area perbatasan setiap tahunnya turut mendorong Turki untuk merubah kebijakannya menjadi Border Wall Project guna meningkatkan keamanan terhadap penyelundupan obat terlarang dan penyelundupan manusia di area perbatasannya.

Singkatnya, perubahan kebijakan Open Door Policy Turki menjadi Border Wall Project pada tahun 2016-2022 disebabkan oleh dorongan yang dihasilkan dari faktor domestik dan faktor internasional. Faktor domestik yang mempengaruhi dalam hal ini adalah tekanan yang dipicu oleh partai politik oposisi, perubahan opini publik masyarakat terhadap para pencari suaka dan topik-topik berita yang diangkat oleh media. Selain itu, tekanan terhadap perubahan kebijakan Open Door Policy juga semakin menguat lantaran meningkatnya serangan terorisme dan penyelundupan ilegal di kawasan perbatasan Turki. Faktor-faktor tersebut secara tidak langsung turut memberikan pengaruh yang signifikan berupa dorongan dan tekanan terhadap pemerintah Turki untuk menstabilkan dan meningkatkan keamanan negaranya dengan memperketat lintasan di area perbatasan dengan membangun tembok perbatasan atau Open Door Policy.

Daftar Pustaka

- Al Jazeera. (2015). Kurdish group claims „revenge murder“ on Turkish police. *Al Jazeera*. <https://www.aljazeera.com/news/2015/7/22/kurdish-group-claims-revenge-murder-on-turkish-police>
- Ataman, M., & Özdemir, Ç. (2018). Turkey's Syria Policy: Constant Objectives Shifting Priorities. *Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi*, 5(2), 13–36. <https://doi.org/10.26513/tocd.466046>
- Balta, E., Elci, E., & Sert, D. (2022). *POLITICAL PARTY REPRESENTATION OF ANTI-IMMIGRATION ATTITUDES: THE CASE OF TURKEY POLITICAL PARTY REPRESENTATION OF ANTI-IMMIGRATION ATTITUDES: THE*. 0–28.

- Basra, R., & ICSR. (2019). Drugs and Terrorism : The Overlaps in Europe. *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction*.
- Batalla, L., & Tolay, J. (2018). Toward Long-Term Solidarity with Syrian Refugees? Turkey's Policy Response and Challenges. *The Atlantic Council*, 1–27.
- BBC Türkçe. (2012). Türkiye'ye 200 bin mülteci gelebilir. *BBC Türkçe*. https://www.bbc.com/turkce/haberler/2012/08/120828_syrian_refugees
- Cengiz, M. (2016). Amped in Ankara : Drug trade and drug policy in Turkey from the 1950s through today. *Brookings*, 1–20.
- Cumhuriyet.tr. (2021). ĞYĞ Parti, parti binalarına "Hudut namustur" pankartı astı. *Cumhuriyet.Com*. <https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/iyi-parti-parti-binalarina-hudut-namustur-pankarti-asti-1861893>
- Cumhuriyet Halk Partisi. (2019). *CHP BİLİM PLATFORMU'NDAN "SARAYIN YANLIŞ GÖÇMEN POLİTİKASININ FATURASINI VATANDAŞ ÖDÜYOR" BAŞLIKLI POLİTİKA NOTU*. <https://chp.org.tr/haberler/chp-bilim-platformundan-sarayin-yanlis-gocmen-politikasinin-faturasini-vatandas-oduyor-baslikli-politika-notu>
- Daily Sabah. (2022). Turkey remains on alert against meth with new measures. *Daily Sabah*. <https://www.dailysabah.com/turkey/turkey-remains-on-alert-against-meth-with-new-measures/news>
- Diken. (2017). Ğzmir'de Suriyelilere saldırı: 500 mülteci mahalleyi terk etmek zorunda kaldı. *Diken*. <https://www.diken.com.tr/izmirde-suriyelilere-saldiri-500-multeci-mahalleyi-terk-etmek-zorunda-kaldi/>
- Duez, D. (2014). A community of borders, borders of the community. The EU's integrated border management strategy. *Borders, Fences and Walls: State of Insecurity?*
- Göker, G., & Keskin, S. (2015). *Haber Medyası ve Mülteciler : Suriyeli Mültecilerin Türk Yazılı Basınındaki Temsili*.
- Hacaoglu, S. (2022). Erdogan Faces New Challenge From Anti-Immigration Firebrand. *Bloomberg News*. <https://www.bnnbloomberg.ca/erdogan-faces-new-challenge-from-anti-immigration-firebrand-1.1758117>
- IFMAT. (2022). Traffickers use refugees to smuggle drugs from Iran to Turkey. *Iranian Regime Frauds Manipulations Atrocities Threats*. <https://www.ifmat.org/06/05/traffickers-refugees-smuggle-drugs-from-iran-turkey/#>
- International Crisis Group. (2023). *Türkiye's PKK Conflict: A Visual Explainer*. <https://www.crisisgroup.org/content/turkiyes-pkk-conflict-visual-explainer>
- ĞYĞ Parti. (n.d.). *İYİ PARTİ PROGRAMI*.
- ĞYĞ Parti. (2022). *STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI MİLLÎ GÖÇ DOKTRİNİ*. Karacasu, H. (2022). *SESSİZ İSTİLA*. <https://youtu.be/EpPo5vjC2bE?si=zeSKqhXdN1ggnkBq>
- Kaska, M. K. (2023). AKP'nin kaybettiği oylar hangi partilere gitti? *BBC*. <https://www.bbc.com/turkce/articles/ergelpzl97mo>
- Kimya, F. (2022). *Syrian Immigration In Turkish Party Politics*.
- Leghtas, I. (2019). *Insecure Future: Deportations and Lack Of Legal Work For Refugees in Turkey*. September.
- Noorzai, R. (2021). Afghan Farmers Continue Growing Opium Poppy as Taliban Sends Mixed Signals on Poppy Eradication. *VOA News*. *Global & Policy Vol.12, No.1 Janari-Juni 2024*

- <https://www.voanews.com/a/afghan-farmers-continue-growing-opium-poppy-as-taliban-sends-mixed-signals-on-poppy-eradication/6349149.html>
- Okuyay, A. S. (2017). Turkey's post-2011 approach to its Syrian border and its implications for domestic politics. *International Affairs*, 93(4), 829–846. <https://doi.org/10.1093/ia/iix068>
- Olejárová, B. (2018). The Great Wall of Turkey: From „The Open-Door Policy” to Building Fortress? *Pogranicze. Polish Borderlands Studies*, 6(2), 117–133. <https://doi.org/10.25167/ppbs55>
- Özbey, K. (2022). AÇIK KAPI POLİTİKASINDAN SINIR DUVARI PROJESİNE : TÜRKİYE 'NİN SINIR POLİTİKASININ DÖNÜŞÜMÜ From Open Door Policy to Border Wall Project : Transformation of Turkey 's Border Policy Giriş Geçmişten günümüze sınırlar , farklı biçim , içerik ve görünümlerl. 23, 709–741. <https://doi.org/10.21550/sosbilder.1060160>
- Ozdemir, D. M. (2022). 2021 Turkey Terrorism Index : PKK.
- Özdemir, E. (2018). Suriyeli Mültecilerin Türkiye'deki Algıları. *Savunma Bilimleri Dergisi*, 16(1), 116–136. <https://doi.org/10.17134/khosbd.405253>
- Pitonak, A. (2018). *Mass Deportations of Afghans from Turkey: Thousands of migrants sent back in a deportation drive*. <https://www.afghanistananalysts.org/en/reports/migration/mass-deportations-of-afghans-from-turkey>